

Penerimaan dan Kesuksesan Sistem Informasi Keuangan Daerah Berbasis Teknologi dalam Perspektif Pengguna

Sri Kaswini¹
Made Sudarma²
M. Achsin³

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Indonesia

*Correspondences: Winnieaci2807@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memaknai perubahan psikologis pengguna dalam menerima dan menggunakan sistem serta kriteria yang mendasari penilaian terhadap kesuksesan sistem informasi keuangan daerah berbasis teknologi dalam perspektif pengguna melalui pendekatan fenomenologi transendental. Hasil penelitian terkait penerimaan sistem dipengaruhi oleh aturan dan sanksi, keyakinan pada sistem, dan komitmen sebagai penguat niat atas penerimaan sistem keuangan daerah. Sedangkan, kesuksesan sistem menurut pengguna dipengaruhi oleh kualitas dari sistem yang digunakan harus memiliki alat pengendalian yang tinggi, penggunaan sistem yang mudah, efektif dan efisien serta keamanan yang dimiliki oleh sistem memadai; kualitas *output* meliputi LKPD yang dihasilkan sesuai dengan undang-undang pengelolaan keuangan daerah dan memiliki unsur akuntabilitas; dan dampak bagi pengguna meliputi adanya perubahan etika dan moralitas pengguna dan peningkatan kinerja. Penggunaan sistem yang bersifat mandatoris ini mewajibkan Pemda untuk bersinergi dengan pengguna karena berhasil tidaknya sistem yang digunakan tidak bergantung pada sistem itu sendiri tapi ada pada pengguna.

Kata Kunci: Penerimaan Sistem; Kesuksesan Sistem Informasi; Fenomenologi Transendental.

The Acceptance and the Success of Technology-Based Regional Financial Information System from User's Perspective

ABSTRACT

This study aims to interpret the psychological changes of users in accepting and using the system as well as the criteria that underlie the assessment of the success of technology-based regional financial information systems from the user's perspective through a transcendental phenomenological approach. The results of research related to system acceptance are influenced by rules and sanctions, belief in the system, and commitment as a reinforcement of the intention to accept the regional financial system. Meanwhile, according to the user, the success of the system is influenced by the quality of the system used, which must have high control tools, easy, effective and efficient use of the system, as well as adequate system security; output quality includes LKPD produced in accordance with the law on regional financial management and has an element of accountability; and the impact on users includes changes in user ethics and morality and increased performance. The use of this mandatory system requires the local government to synergize with users because the success or failure of the system used does not depend on the system itself but on the users.

Keywords: System Acceptance; Information System Success; Transcendental Phenomenology.

Artikel dapat diakses : <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/index>



e-ISSN 2302-8556

Vol. 33 No. 8
Denpasar, 31 Agustus 2023
Hal. 2160-2171

DOI:
10.24843/EJA.2023.v33.i08.p14

PENGUTIPAN:
Kaswini, S., Sudarma, M., & Achsin, M. (2023). Penerimaan dan Kesuksesan Sistem Informasi Keuangan Daerah Berbasis Teknologi dalam Perspektif Pengguna. *E-Jurnal Akuntansi*, 33(8), 2160-2171

RIWAYAT ARTIKEL:
Artikel Masuk:
18 Juni 2022
Artikel Diterima:
22 Desember 2022

PENDAHULUAN

Dalam rangka menjamin kegiatan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan Pemda wajib menggunakan sistem informasi keuangan daerah (SIKD) berbasis teknologi dalam menghasilkan laporan keuangan daerah (LKPD). Namun, dalam penerapan sistem berbasis teknologi dalam proses pengelolaan keuangan daerah tidak terlepas dari masalah birokrasi. Dwiyanto (2011) menjelaskan bahwa aroma politik, kekuasaan, sosial, ekonomi, nilai historis serta pertautan kepentingan antara pihak eksekutif dan legislatif serta sederet regulasi dapat membatasi ruang gerak orang-orang, aparatur pemerintah, untuk berfikir kreatif.

Pernyataan Dwiyanto (2011) sesuai dengan penelitian yang dilakukan sebagaimana dalam penelitian Asrori (2009) dalam penelitiannya tentang bagaimana mengembangkan sistem akuntansi Pemda. Penelitian ini dilakukan di Pemda Kabupaten Demak. Hasil penelitiannya menemukan bahwa untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi, akuntabilitas, serta kinerja pengelolaan keuangan daerah sudah selayaknya Pemda memperhatikan teknologi tepat guna dan melibatkan pengguna. Sayangnya, sektor publik sebagai entitas sarat dengan berbagai kepentingan sehingga berdampak pada konsensus segala aktivitas yang dijalankan mengikuti hierarki dengan kewenangan yang diatur UU.

Adanya permasalahan birokrasi ini menjadi menarik bagaimana sistem pengelolaan diterapkan, sebagaimana Jogiyanto (2007) menegaskan bahwa penerapan sistem tidak terlepas dari masalah manusia sebagai pengguna dan teknologi yang digunakan. Kegagalan implementasi sistem terjadi karena adanya keengganan atau penolakan individu-individu yang ada di dalam perusahaan terhadap implementasi sistem informasi berbasis teknologi (Venkatesh et al., 2003). Selain itu juga, penerimaan dan kesuksesan SIKD berbasis teknologi sering tidak sesuai dengan harapan organisasi hal ini disebabkan ketika suatu desain sistem informasi akuntansi diterapkan, dua faktor kunci yang harus diperhatikan, yaitu teknologi yang digunakan dan perilaku manusia yang ada di dalam organisasi tersebut (Baridwan, 2012).

Dalam konteks sistem informasi keperilakuan, menurut teori tindakan beralasan (*theory of reason action (TRA)*) menjelaskan bahwa niat perilaku dibentuk oleh sikap dan Norma subjektif. Menurut Hartono (2007) niat merupakan dua penentu dasar, yang satu berhubungan dengan faktor pribadi dan yang lainnya berhubungan dengan pengaruh sosial. Dua penentu dasar tersebut yaitu, sikap (*attitude*) dan Norma subjektif (*subjective norms*).

Yilmaz dan Ozer (2008) menemukan bahwa niat dari akuntan terkait dengan penggunaan *IT* memiliki pengaruh positif terhadap perilaku penggunaan *IT*, hasil yang sama ditemukan pada norma subjektif yang memiliki pengaruh positif terhadap niat penggunaan *IT*, sedangkan untuk sikap Yilmaz dan Ozer (2008) menemukan bahwa ketika akuntan memiliki sikap yang baik terhadap penggunaan *TI*, maka semakin besar niat dari akuntan untuk menggunakan *TI* tersebut. Hung et al., (2006), Fu et al., (2006), Fathinah dan Baridwan (2012), dan Bidin et al., (2014) menyatakan bahwa, ketika wajib pajak mengikuti pandangan orang lain untuk menggunakan *on-line tax filing*, maka semakin besar niat wajib pajak untuk menggunakan *on-line tax filing* dalam melaporkan pajak terutangannya. Ajzen dan Fishbein (1980) menyatakan bahwa sikap merupakan penentu dasar yang

berhubungan dengan niat individu untuk melakukan suatu perilaku. Lu *et al.*, (2010) meyakini bahwa sikap merupakan faktor penting yang memengaruhi niat wajib pajak untuk menggunakan sistem *e-filing*. Pengaruh sikap terhadap niat dikarenakan wajib pajak merasa nyaman dalam menggunakan sistem *e-filing*. Pantow (2016) menemukan bahwa sikap berpengaruh terhadap niat wajib pajak menggunakan sistem *e-filing* dalam penyampaian pajak.

Ketika pengguna menerima sistem dengan baik berarti sistem yang digunakan dikatakan sukses, ada berbagai macam penilaian kesuksesan sistem antara lain sebagaimana Delone & McLean (2003) menyebutkan ada enam dimensi yang menjadi tolak ukur dalam menilai kesuksesan suatu sistem yaitu 1) kualitas sistem (*system quality*), 2) kualitas informasi (*information quality*), 3) pengguna (*user*), 4) kepuasan pemakai (*user satisfaction*), 5) dampak individu (*individual impact*), dan 6) dampak organisasi (*organization impact*). Jogiyanto mengutip dari Whyte *et al.* (2007: 87) berpendapat bahwa terdapat perbedaan yang penting dalam pengukuran kesuksesan dipandang dari organisasional, pemakai, dan perbedaan sistemnya. Tidak ada satupun pengukuran yang benar, semua tergantung dari konteksnya. Pemilihan pengukuran kesuksesan tergantung dari tujuan penelitiannya, konteks organisasinya, siapa pemakainya, dan bentuk aplikasi dari sistemnya. Sukoharsono (2008:17) mengingatkan bahwa saat ini penilaian atas kesuksesan sistem informasi menjadi lebih kompleks, yaitu bukan hanya persoalan teknologi, tetapi merupakan kombinasi antara aplikasi teknologi informasi yang benar untuk mendukung orang dalam membentuk proses yang benar. Hal ini memberikan isyarat bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah bukan hanya terkait dengan persoalan tersedianya sarana sebagai alat bantuan tetapi bagaimana pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penelitian dilakukan di Pemerintah Kabupaten Lombok Utara, provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) baru berdiri dan sedang berkembang, yang mengalami pergantian sistem dalam pengelolaan keuangan. Setidaknya ada dua jenis sistem yang pernah dan diimplementasikan di Pemda Lombok Utara yaitu, Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD), dan Sistem Informasi Manajemen Dinas Daerah (SIMDA) untuk menggunakan aplikasi SIMDA sebagai pengganti aplikasi sebelumnya yaitu SIPKD. Adanya fenomena pergantian penggunaan sistem menjadi semakin menarik untuk dilakukan penelitian lebih mendalam terkait bagaimana pengguna menerima sistem yang sifatnya mandatoris serta mampu memberikan penilaian terhadap kesuksesan sistem yang digunakan oleh pengguna sistem tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi transendental. Menurut Burrell & Morgan (1979), fenomenologi transendental memiliki filosofi yang mencoba untuk memahami bahwa dunia ini sebagai fenomena bukan merupakan objek, tetapi memiliki makna yang murni (*pure meaning*). Analisis fenomenologi transendental yang digunakan oleh peneliti, yaitu: Noema, Noesis, Epoche (Bracketing), Intentional Analysis, dan Eidetic Reduction. Intuisi dan intersubjektivitas merupakan unsur penting dalam penelitian fenomenologi (Kuswarno, 2009). Penelitian dilakukan di Dinas

Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Lombok Utara pada tahun 2016. Dipilihnya DPPKAD sebagai situs penelitian karena, pertama, akses data mudah, kedua DPPKAD berhubungan langsung dalam membantu bupati dalam mengelola keuangan daerah dan bertanggungjawab membuat APBD, laporan keuangan kabupaten. Ketiga, DPPKAD sebagai leading sector dalam pengelolaan keuangan daerah, memiliki fungsi ganda sebagai PPKD dan SKPD, serta memiliki wewenang untuk mengawasi laporan keuangan seluruh SKPD yang ada kabupaten Lombok Utara. Keempat, DPPKAD sebagai pusat pengembangan SIKD berbasis teknologi, sehingga menjadi point penting bagi peneliti dalam menetapkan DPPKAD sebagai situs penelitian.

Informan dalam penelitian ini yaitu individu yang terlibat langsung dengan sistem yaitu ketua seksi penganggaran (MLA) dan ketua seksi pelaporan keuangan daerah (MWI), alasannya karena kedua informan ini yang benar-benar terlibat dengan sistem sebagaimana yang diungkapkan oleh Kamayanti (2016) menjelaskan bahwa fenomenologi transendental berfokus pada "Aku", dimana "Aku" disini dimaksudkan aku yang mengalami dan yang melakukan.

Pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Pengujian terkait keabsahan data dengan menggunakan metode triangulasi waktu dan sumber. Triangulasi waktu dilakukan dimana peneliti mengajukan pertanyaan serupa pada informan dengan waktu yang berbeda, apabila jawaban yang diberikan oleh informan tidak mengandung makna yang berbeda, maka data dapat dianggap valid. Triangulasi sumber dilakukan oleh peneliti dengan mengajukan pertanyaan yang serupa pada informan yang berbeda, apabila ditemukan kesamaan makna dari beberapa informan maka data dianggap valid.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk memaknai perubahan psikologis pengguna dalam menerima dan menggunakan sistem serta kriteria yang mendasari penilaian terhadap kesuksesan SIKD berbasis teknologi dalam perspektif pengguna yang sifatnya mandatoris. Hasil dari penelitian ini menemukan beberapa hal penting yaitu: Pertama penerimaan sistem terjadi karena adanya aturan dan sangsi, keyakinan pada sistem, serta komitmen menjadi penguat niat pengguna untuk menggunakan sistem. Kedua, kesuksesan sistem menurut informan yaitu kualitas sistem sebagai alat pengendalian, operasional sistem yang mudah, efektif dan efisien, perlindungan terhadap informasi yang dihasilkan. Kualitas informasi meliputi LKPD sesuai peraturan dan memiliki tingkat akuntabilitas yang tinggi. Dampak bagi pengguna, perubahan etika dan moralitas dan peningkatan terhadap kinerja pengguna.

Pemda diberikan kebebasan untuk memilih sistem yang digunakan dengan syarat sistem tersebut mampu mengakomodir seluruh aturan pengelolaan keuangan, dalam proses pemilihan sistem, pengguna tidak diberikan kesempatan untuk memilih sistem yang menurut mereka berguna, sehingga hal ini memicu pemerintah setempat menggunakan aturan tertuang dalam peraturan Nomor 896/21/DPPKAD/2016. Seperti kutipan dari wawancara informan:

"karena sudah ada aturan yang dikeluarkan oleh pemda, mau gak mau setiap SKPD harus menerimanya". (MWI)

“harus diterima, kalau tidak diterima sistem yang baru ini, kami di dinas (DPPKAD maksudnya) tidak mau menerima usulan untuk anggaran dari setiap SKPD. (MLA)

Selain aturan dan sangsi, penerimaan sistem didasari pada pandangan rekan sejawat seperti kutipan dari informan:

“kami memberikan contoh diri kami sendiri, kalau sistem ini mudah digunakan, perlu latihan dan saya sangat senang menggunakan sistem”. (MWI)

“kami DPPKAD sebagai *leading* sektor pengelolaan keuangan daerah harus memberikan contoh ke SKPD lainnya, senang menggunakan sistem”. (MLA)

Jika dikaitkan dengan penerimaan sistem yaitu norma subjektif yang merupakan salah satu bagian dari *Theory of Reason Action* (TRA) adalah persepsi atau pandangan seseorang terhadap kepercayaan-kepercayaan orang lain yang akan memengaruhi niat untuk melakukan perilaku yang sedang dipertimbangkan (Hartono, 2007). Dalam penelitian ini norma subjektif meliputi sejauh mana informan merasa bahwa pandangan seseorang memengaruhi mereka dalam menggunakan aplikasi SIMDA sebagai alat bantu dalam menghasilkan laporan keuangan daerah. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa norma subjektif sesuai dengan penelitian Pantow (2016) yaitu adanya pandangan rekan sejawat memengaruhi mereka dalam menerima sistem, yang berbeda hanya pada aturan dan sangsi yang mengikat pengguna untuk menerima sistem.

Penelitian ini sesuai dengan penelitian Pantow (2016), Hansen et al., (2004); Kim et al., (2009) yang menyatakan bahwa norma subjektif berpengaruh positif terhadap sikap meliputi adanya perasaan bahagia saat menggunakan sistem sebagai respon baik pengguna dalam penggunaan sistem dipengaruhi oleh pandang orang dalam menggunakan sistem. Hasil temuan ini juga mendukung model *Theory of Reason Action* (TRA) oleh Yilmaz & Özer (2008) yang menemukan adanya pengaruh norma subjektif terhadap sikap individu dalam melakukan suatu perilaku. Selain itu adanya desakan dari lingkungan (Pemda) untuk menggunakan sistem yang telah dipilihkan, tidak menjadi penghalang pengguna untuk tetap menggunakan sistem yang ada.

Keyakinan disini diartikan sebagai bentuk kepercayaan informan atas kemudahan dan kebermanfaatannya dari sistem yang digunakan, seperti kutipan wawancara:

“sistem yang sekarang sangat membantu kami dalam menyelesaikan pekerjaan, sistemnya tidak seribet sistem sebelumnya”. (MLA)

“sangat membantu saya dalam mengerjakan laporan keuangan, waktu yang saya gunakan untuk menyelesaikan pekerjaan tidak terbuang sia-sia”. (MWI)

Penelitian ini sesuai dengan penelitian Pantow (2016) yang menemukan bahwa kegunaan dan kemudahan berpengaruh positif terhadap sikap pengguna, artinya ketika pengguna merasa sistem itu memberikan manfaat, adanya kemudahan dalam proses penggunaan sistem akan berdampak positif bagi kinerja si pengguna itu sendiri. Dampak positif tersebut tercermin dari kutipan wawancara:

“saya nyaman, senang dengan aplikasi yang dipilih oleh pimpinan, saya sangat merasakan manfaat dari aplikasi ini, saya jatuh cinta dengan aplikasi ini”. (MWI)

“tidak sia-sia pimpinan memilih aplikasi ini, saya sudah nyaman dan terbiasa dengan aplikasi ini”. (MLA)

Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian Sriwidharmanely & Syafrudin (2012) yang menemukan bahwa kegunaan dan kemudahan sistem tidak memberikan pengaruh positif terhadap sikap pengguna seperti adanya kenyamanan, perasaan suka, bahagia.

Komitmen disini diartikan sebagai kemauan dan kemampuan untuk menyetarakan sikap tindakan PNS untuk mewujudkan tujuan organisasi di atas kepentingan individu (PP Nomor 46 Tahun 2011 pasal 12 ayat 1), hal ini sesuai dengan kutipan wawancara:

“penerimaan sistem kalau bagi saya sendiri adalah balasan kepada Pemda sudah memberikan kebaikan dalam karier saya, saya harus membalasnya dengan menggunakan sistem yang ada”. (MWI)

“kami sebagai pengelolaan keuangan daerah harus siap dengan sistem yang dipilih oleh Pemda, kami memiliki tanggung jawab sesuai dengan tupoksi yang ada. (MLA)

Selain komitmen memengaruhi niat pengguna, niat juga timbul sebagai akibat dari adanya keterbantuan sistem dalam membantu proses pengelolaan keuangan daerah, hal ini sesuai dengan kutipan wawancara:

“sistem yang sekarang sangat membantu kami dalam menyelesaikan pekerjaan, sistemnya tidak seribet sistem sebelumnya”. (MLA)

“sangat membantu saya dalam mengerjakan laporan keuangan, waktu yang saya gunakan untuk menyelesaikan pekerjaan tidak terbuang sia-sia”. (MWI)

Adanya manfaat yang dirasakan oleh pengguna, memberikan pengaruh bagi keberlangsungan penggunaan sistem, seperti kutipan wawancara:

“karena saya sudah jatuh cinta dengan sistem ini, saya menggunakan terus menerus menggunakan aplikasi ini (SIMDA maksudnya)”. (MWI)

“sangat membantu saya dalam menyelesaikan pekerjaan, saya menggunakannya lagi dan lagi”. (MLA)

Hasil dari penelitian ini selaras dengan penelitian Pantow (2016), Sriwidharmanely & Syafrudin (2012), Dwitasari & Zaki Baridwan (2014) yang menemukan bahwa sistem yang berguna akan memengaruhi niat pengguna dalam menggunakan sistem. Manfaat dari sistem yang dirasakan oleh pengguna memengaruhi niat dalam menerima dan menggunakan sistem yang disediakan Pemda. Ketika pengguna memiliki niatan yang tulus untuk menggunakan sistem yang ada, berdampak pada hasil pekerjaan dan keberlangsungan dari sistem tersebut.

SIKD berbasis teknologi harus memiliki sistem pengendalian intern (SPI) yang baik. Pengendalian intern ini meliputi pengawasan terhadap seluruh metode

dan prosedur kegiatan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan standar yang ada, seperti kutipan wawancara:

“sistem menjadi alat pengendalian terbukti jika ada selisih dalam laporan kita bisa menelusurinya, tidak ada perasaan ragu atas *output*”. (MWI)

“sistem yang digunakan saat ini (SIMDA) memiliki pengendalian yang tinggi, contoh, jika SKPD mengajukan anggaran untuk pengadaan barang dan jasa sebesar Dua puluh juta, maka SKPD tersebut tidak bisa melakukan transaksi di atas anggaran yang ditetapkan, karena secara otomatis sistem menolak”. (MLA)

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Indriasari (2016) dimana sistem yang berkualitas harus mampu menjadi alat pengawasan atau pengendalian bagi pengelolaan keuangan daerah serta sistem tersebut harus mampu mengcover semua aturan, kebijakan, standar dan prosedur SIKD. Adanya pengendalian ini tidak memberikan ruang bagi pengguna untuk main-main dengan sistem, sehingga tata kelola keuangan pemerintah menuju lebih baik bisa diwujudkan. Berdasarkan uraian di atas, semua informan memahami bahwa salah satu hal yang harus dipenuhi dalam mensukseskan penggunaan sistem informasi berbasis teknologi yaitu kemampuan sistem menjadi alat pengendalian atau kontrol yang memadal terkait dengan aktivitas pengelolaan keuangan daerah. Adanya pengendalian yang baik yang ada pada sistem memberikan keyakinan dan kepercayaan terhadap LKPD yang dihasilkan oleh sistem dapat dipercaya kebenarannya serta sesuai dengan peraturan, kebijakan terkait dengan pengelolaan keuangan daerah.

Pengelolaan keuangan daerah yang begitu kompleks memerlukan sistem informasi yang dapat memberikan kemudahan, akses yang tidak berbelit-belit sehingga dapat memberikan dampak pada efektivitas dalam proses pengelolaan keuangan daerah, seperti kutipan wawancara di bawah ini:

“Sistem yang kami gunakan sekarang ini lebih baik dibandingkan dengan sistem terdahulu, yang sekarang (SIMDA makudnya) ini saya sangat suka sekali, sangat membantu saya dalam mengerjakan laporan keuangan, waktu yang saya gunakan untuk menyelesaikan pekerjaan tidak terbuang sia-sia. (MWI)

“sistem yang sekarang sangat membantu kami dalam menyelesaikan pekerjaan, sistemnya tidak seribet sistem sebelumnya, waktu juga tidak terbuang percuma, jadi lebih efektif bagi kami dalam menyelesaikan pekerjaan”. (MLA)

Sistem yang baik adalah sistem yang mudah digunakan, kemudahan menggunakan sistem berimplikasi pada perubahan perilaku yang positif dari pengguna. Kecenderungan perubahan perilaku pengguna dengan merasakan kemudahan dalam menggunakan sistem memberikan pengaruh baik bagi kesuksesan implementasi sistem maupun bagi pengguna itu sendiri, sehingga penelitian ini sesuai dengan penelitian Indriasari (2016) dimana dalam penelitiannya menyatakan bahwa sistem yang berkualitas adalah sistem yang dalam penggunaannya mudah, efektif dan efisien. Oleh karena itu, Pemda harus

jeli dalam menentukan sistem informasi mana yang digunakan, sistem yang digunakan tersebut tidak hanya melihat asas manfaat tapi juga harus melihat biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan sistem tersebut. Pemilihan sistem tidak hanya terbatas pada kecanggihan *fitur-fitur* dalam sistem tersebut tapi harus memperhatikan pengguna.

SIKD berbasis teknologi merupakan sumber daya yang sangat penting dan layak untuk dijaga. Cara yang paling sering dilakukan untuk menjaga keamanan dari sistem informasi dengan pembatasan akses yaitu penerapan *password*,

“Saya rasa sistem itu harus memiliki tingkat keamanan yang tinggi, seperti sistem yang sekarang ini (SIMDA maksudnya). Setiap seksi (bagian) dalam pengelolaan keuangan daerah memiliki *password* masing-masing, saya di bagian pelaporan tidak memiliki hak untuk mengakses bagian anggaran maupun sebaliknya, hal ini kami lakukan agar tidak terjadinya kecurangan, kecurian data oleh pihak yang tidak terlibat dalam pengelolaan keuangan”. (MWI)

“terkait dengan keamanan sistem yang digunakan sekarang sudah cukup baik, masing-masing seksi yang berhubungan dengan proses pengelolaan keuangan daerah memiliki *password* sehingga bagian anggaran maupun bagian akuntansi tidak memiliki akses terhadap data”. (MLA)

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang di lakukan oleh Indriasari (2016) dimana salah satu indikator sistem yang berkualitas memiliki perlindungan terhadap sistem, yaitu adanya *password* kepada pengguna merupakan jaminan bahwa mereka menggunakan *password* tersebut dengan bijak dan tidak memberikan *akses* kepada pihak yang tidak berkepentingan, hal ini dilakukan agar data keuangan daerah terlindung dari ancaman kebocoran data.

Penilaian *output* yang dihasilkan oleh sistem khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah harus sesuai dengan standar, secara spesifik standar yang dimaksud meliputi program, aktivitas, dan undang-undang atau regulasi yang berkaitan dengan keuangan daerah, serta kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Hasil *output* pengelolaan keuangan daerah yaitu laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD), kutipan wawancara:

“regulasi mewajibkan Pemda untuk melaporkan keuangan daerahnya dalam bentuk LKPD yang tentunya harus sesuai dengan UU. Format LKPDnya harus sesuai dengan SAP juga. Sistem yang digunakan saat ini (SIMDA) sudah mampu mengakomodir regulasi yang ada”, (MLA)

“SIMDA ini merupakan aplikasi pengelolaan keuangan daerah, undang-undang mengatur bahwa seluruh Pemda di Indonesia wajib menghasilkan LKPD, dan menurut saya SIMDA sudah berperan penting dalam membantu menghasilkan LKPD yang sesuai dengan undang-undang”. (MWI)

Jika kriteria yang digunakan untuk mengukur keberhasilan penggunaan sistem adalah LKPD yang dihasilkan sesuai dengan SAP, maka tidaklah berlebihan kalau LKPD yang dihasilkan menjadi tolak ukur atas keberhasilan dari implementasi sistem tersebut sudah tercapai. Penelitian ini sesuai dengan

penelitian Indriasari (2016) menyatakan bahwa *output* dihasilkan sistem adalah LKPD yang sesuai dengan standar, kebijakan, dan UU pengelolaan keuangan daerah. Kewajiban untuk menghasilkan dan memberikan keuangan melalui LKPD inilah harus dapat diakomodir oleh sistem. Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN/APBD yang menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 yang mana LKPD yang dihasilkan pemda harus mengikuti SAP yang selanjutnya dinyatakan dalam PSAP baik bentuk maupun isinya.

LKPD yang dihasilkan sesuai dengan SAP dan pertanggungjawaban moral pada Tuhan. Pertanggung jawaban yang dimaksud yaitu akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang benar, tertib, dan disiplin, benar disini dimaksudkan bahwa data yang tersaji di LKPD adalah sesuai adanya, tertib dimaksudkan bahwa pengelolaan keuangan daerah disajikan sesuai dengan undang-undang dan secara administrasi dapat dipertanggung jawabkan, sedangkan disiplin menunjukkan tertibnya penggunaan anggaran serta patuh terhadap peraturan undang-undang. Seperti kutipan wawancara di bawah ini:

“salah satu indikator keberhasilan dari sistem yang digunakan saat ini mampu menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, sesuai aturan, dan dapat digunakan oleh semua pihak yang membutuhkan LKPD”. (MLA)

“sistem yang digunakan sekarang mampu menghasilkan LKPD yang akuntabel, sesuai aturan keuangan daerah, dengan begitu sistem yang digunakan harus akuntabel juga tentunya sistem itu harus bagus dan berkualitas”. (MWI)

Sistem yang digunakan di situs penelitian ini mampu menghasilkan LKPD yang akuntabel, sesuai dengan aturan keuangan daerah. Proses pencatatan atas transaksi yang terjadi harus dilakukan dengan benar sesuai dengan prosedur yang ada. Pencatatan semua transaksi yang terjadi diperlukan sistem yang berkualitas dan akuntabel dalam mengolah data untuk menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Kualitas *output* yang dihasilkan oleh sistem harus memiliki keandalan, semua transaksi dan angka yang ada dilaporkan mencerminkan yang sebenarnya terjadi, penelitian ini selaras dengan dengan penelitian Indriasari (2016) menyatakan bahwa LKPD yang handal dan dapat digunakan oleh semua pihak.

Sistem adalah alat untuk membantu pengguna dalam mencapai tujuan, yang menjadi ujung tombaknya adalah pengguna harus memiliki moral yang baik. Hal ini ditegaskan oleh Sukoharsono (2008) yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi berimplikasi pada etika dan moral manusia baik sebagai individu maupun kelompok. Dalam tulisan lainnya Sukoharsono (2008) menyatakan bahwa apabila suatu sistem yang sukses adalah sistem yang dapat menambah nilai atau kontribusi pada perusahaan, maka sistem tersebut juga harus memberi dampak yang positif bagi perilaku penggunanya. Seperti kutipan wawancara di bawah ini:

“saya bekerja bukan karena adanya sistem yang mengawasi saya, tapi yang saya kerjakan saya pertanggungjawabkan kelak (Akherat maksudnya), setiap Jumat pagi kami ada kegiatan

IMTAQ. Semua yang saya kerjakan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab dan semua itu ada *ditupoksi* masing-masing yang diberikan oleh atasan". (MWI)

"Sistem yang digunakan sekarang ini bisa sebagai alat pengendalian, karena percuma sistem andal, canggih kalau penggunanya tidak mampu mengendalikan diri, Setiap hari Jumat pagi kami disini (DPPKAD) melakukan kegiatan IMTAQ dengan tujuan agar kami selalu ingat bahwa ada Allah yang selalu melihat kita bekerja, sehingga hal ini bisa menjadi cctv agar kami selalu jujur dalam menginput data". (MLA)

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Indriasari (2016), bahwa dampak yang dirasakan dari sistem dapat meningkatkan moralitas pengguna dalam menjalankan proses pengelolaan keuangan daerah. Moralitas dari pengguna diperkuat dengan keyakinan pada sang pencipta bahwa segala sesuatu yang dikerjakan mendapatkan balasannya. Adapun wujud dari etika adalah aturan-aturan yang mampu mengontrol perilaku pegawai dari tindakan yang tidak benar, sistem yang digunakan mampu mengakomodir semua peraturan sehingga tidak ada celah bagi pengguna untuk melakukan tindakan yang dapat merugikan diri sendiri, daerah dan Negara, sehingga hal ini menjadikan pengguna sebagai ujung tombak sukses atau tidak sistem yang digunakan.

Penggunaan sistem informasi berbasis teknologi dalam proses pengelolaan keuangan daerah mempunyai andil besar dalam meningkatkan kinerja pegawai karena teknologi memudahkan dan membantu pengguna untuk memenuhi tugas dan kewajiban yang sesuai dengan *tupoksi* yang telah ditetapkan. Pengguna merasa sistem yang digunakan dapat meningkatkan kinerja mereka, dapat dilihat semangat mereka dalam bekerja, menghasilkan laporan keuangan tepat waktu. Hal-hal positif ini terjadi karena pengguna merasakan sendiri manfaat dari sistem yang digunakan sesuai dengan pernyataan Sukoharsono (2008) menyatakan bahwa suatu sistem informasi dikatakan sukses jika pengguna bersedia menggunakannya dan pengguna merasa puas, namun yang paling utama adalah sistem harus dapat meningkatkan kualitas pekerjaan penggunanya. Pernyataan Sukoharsono (2008) selaras dengan kutipan wawancara di bawah ini:

"perubahan sistem harus dapat membantu meningkatkan kinerja, jangan kayak sebelumnya, banyak teman SKPD yang telat menyerahkan laporan keuangan, karena ada sistem baru pekerjaan jadi tidak menumpuk lagi, sebisa mungkin harus *on time*". (MWI)

"sebelum sistem diganti (menyebutkan nama sistem yang lama) kami disini jujur saja tidak memahami bagaimana menggunakannya, cara mengoperasikan dari penganggaran, penatausahaan dan penyusunan laporan keuangan, namun setelah sistem diganti dengan sistem yang sekarang, dibidang mahir bisa saja (tersenyum), sistem yang sekarang kami sudah mampu menggunakan dan sangat-sangat membantu kami, kalau ada rekan-rekan di luar SKPD kami (DPPKAD maksudnya) kami siap memberikan bimbingan khusus walaupun dulu-dulunya sudah ada pelatihan. Semuanya itu

tidak terlepas dari perbedaan karakter setiap pengguna ada yang senang belajar hal-hal baru ada juga yang rada-rada sulit, mungkin malas berkaitan dengan komputer. Sistem ini sudah bagus jadi tidak ada alasan tidak bisa lagi karena kita sudah membantu membina mereka (para pengguna maksudnya) untuk bekerja lebih baik dan tentunya lebih cepat waktu".
(MLA)

Hasil penelitian ini jika dikaitkan dengan indikator kesuksesan sistem yaitu dampak bagi pengguna yaitu adanya peningkatan kinerja sesuai dengan penelitian Indriasari (2016) sesuai, dimana perubahan perilaku dan kinerja pengguna berubah, yang sebelum adanya perubahan sistem pengguna kesulitan sebab sistem yang sebelumnya tidak dipahami dengan baik serta sering terjadi keterlambatan dalam menyampaikan laporan dari SKPD ke DPPKAD, dengan sistem yang baru mereka merasa ada pengaruh baik bagi psikologis pengguna dan pekerjaan mereka selesai tepat waktu.

SIMPULAN

Penerimaan sistem terjadi aturan dan sangsi menjadi alasan dalam penerimaan sistem keuangan daerah, keyakinan pada sistem, komitmen sebagai penguat niat atas penerimaan sistem keuangan. Kesuksesan sistem menurut infoman yaitu kualitas sistem sebagai alat pengendalian, operasional sistem yang mudah, efektif dan efisien, perlindungan terhadap informasi yang dihasilkan. Kualitas informasi meliputi LKPD sesuai peraturan dan memiliki tingkat akuntabilitas yang tinggi. Dampak bagi pengguna, perubahan etika dan moralitas dan peningkatan terhadap kinerja pengguna.

Kendala bagi peneliti adalah waktu, peneliti hanya diberikan waktu satu bulan dan penelitian bertepatan dengan bulan puasa serta pada bulan tersebut pekerjaan informan banyak sekali. Peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian serupa pada instansi, kabupaten maupun provinsi yang berbeda, agar lebih mengetahui kendala yang memengaruhi penggunaan sistem baru dalam proses pengelolaan keuangan daerah.

REFERENSI

- Asrori. (2009). Model Pengembangan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 1(1).
- Burrell, G., & Morgan, G. (1979). *Sosilogical Paradigms and Organizational Analysis*. Heinemann Education.
- Delone, W. H., & McLean, E. R. (2003). The DeLone and McLean Model of Information Systems Success: A Ten-Year Update. *Journal of Management Information Systems / Spring*, 19(4), 9-30. [https://doi.org/10.1016/0012-1606\(78\)90250-6](https://doi.org/10.1016/0012-1606(78)90250-6)
- Dwitasari, M., & Zaki Baridwan. (2014). Faktor Determinan Minat Individu Menggunakan M-Commerce: Technology Acceptance Model yang Dimodifikasi. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya*, 2(1), 1-16.
- Dwiyanto, A. (2011). *Mengembalikan Kepercayaan Publik Melalui Reformasi Birokrasi*. PT Gramedia Pustaka Utama.

- Hansen, T., Jensen, J. M., & Solgaard, H. S. (2004). Predicting online grocery buying intention: A comparison of the theory of reasoned action and the theory of planned behavior. *International Journal of Information Management*, 24(6), 539–550. <https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2004.08.004>
- Hartono, M. J. (2007). *Sistem Informasi Keperilakuan*. Andi.
- Indriasari, R. (2016). *Konsep Kesuksesan Implementasi Sistem Informasi Keuangan Daerah Berbasis Teknologi*. Universitas Brawijaya.
- Jogiyanto, H. (2007). *Model kesuksesan Sistem Informasi*. Andi Offset.
- Kamayanti, A. (2016). *Metodelogi Penelitian Kualitatif Akuntansi: Pengantar religiositas Keilmuan*. Yayasan Rumah Peneleh.
- Kim, H. bumm, Kim, T. (Terry), & Shin, S. W. (2009). Modeling roles of subjective norms and eTrust in customers' acceptance of airline B2C eCommerce websites. *Tourism Management*, 30(2), 266–277. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2008.07.001>
- Kuswarno, E. (2009). *Metodologi Penelitian Komunikasi Fenomenologi: Konsepsi Pedoman dan Contoh Penelitiannya*. Widya Padjajaran.
- Pantow, A. K. (2016). *Analisis Perilaku Wajib Pajak Dalam Penggunaan E-Filing Sebagai Sistem Pelaporan Pajak (Studi Empiris Di Kota Malang)*. Universitas Brawijaya.
- Sriwidharmanely, & Syafrudin, V. (2012). An Empirical Study of Accounting Software Acceptance among Bengkulu City Students. *Asian Journal of Accounting and Governance*, 3(1), 99–112. <https://doi.org/10.17576/ajag-2012-3-6521>
- Sukoharsono, E. G. (2008). *Sistem Informasi Manajemen*. Surya Pena Gemilang.
- Venkatesh, V., Morris, M. G., Davis, G. B., & Davis, F. D. (2003). User Acceptance of Information Technology : Toward a Unified View. *MIS Quarter*, 27(3), 425–478. <https://doi.org/10.2307/30036540>
- Yilmaz, E., & Özer, G. (2008). INFORMATION TECHNOLOGY USAGE OF ACCOUNTANTS. *Information Technology Usage of Accountants*, 318–334.